

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Berkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Direktorat Pembinaan, 2006), 147-148; Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” 59.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. VIII. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, terj. Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2012.
- Al-Syafi’i, Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi. *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*. Semarang: Usaha Keluarga, t.th..
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Media Syari’ah*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Arifin, Zainal. “Perkawinan Beda Agama.” *Al-Insiroh*, Vol. 2 No. 1, 2018.
- Aslami, Airis, Djanuardi, dan Fatmi Utarie Nasution. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.” *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 10, September 2023.
- Asmara, Yuda. “Kedudukan SEMA terhadap Suatu Undang-Undang,” pada laman <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9/>, diakses pada 09 Oktober 2023.
- Asmara. “Kedudukan SEMA terhadap Suatu Undang-Undang,” pada laman <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9/>. Diakses pada tanggal 09 Oktober 2023.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baro, Rachmad. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Makassar: Indonesia Prime, 2017.
- Cahyadi, Irwan Adi. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Hukum Positif di Indonesia.” *Brawijaya Law Student Journal*, Mei 2014.
- Cruz, Peter De. *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, dan Socialist Law*, terj. Nrulita Yusron. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Dahwal, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Bandar Maju, 2016.
- Darmabrata, Wahyono, dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit FH. UI, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Jumānatul ‘Alī Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.

- Fanani, Ahmad Zaenal. "Hermeneutika Hukum sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum," pada laman <http://pa-bengkulukota.go.id/foto/Hermeneutika%20Hukum%20Sebagai%20Meto%20de%20Penemuan%20Hukum.pdf>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2023.
- Fasihuddin, Muhammad. *dkk., Syarah Fathal Qarib: Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab Mu'tabarrah*. Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Fatahullah, Israfil, dan Sri Hariati. "Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* Vol. 5 No. 1, Juni 2020.
- Hadjon, Philipus M.. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Hanifa, Gina, *dkk.*. "Inkonsistensi Peraturan Perundang-undangan dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama." *Cross-border*, Vol. 5 No. 2, Juli-Desember 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Islamiyati. "Pencatatan Pernikahan Sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri dalam Hukum Islam (Analisa terhadap Metode Penggalian Hukum)." *MMH*, Jilid 39 No, 3, September 2010.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Mahkamah Agung RI, "Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan" pada laman <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2023/detail>. Diakses pada tanggal 09 Oktober 2023.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*, terj. Siwi Purwandari. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Kharisma, Bintang Ulya. "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?." *Journal of Scientech Research and Development* 5.1, 2023.
- Komnas Perempuan. "Siaran Pers Komnas Perempuan Perempuan Merespon Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan" (Juli 2023), dalam laman <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-dan-kepercayaan>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2023.
- Mahfud. "Hermeneutika Hukum dalam Metode Penelitian Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 63, Th. XVI, Agustus 2014.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia pada laman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Pencatatan+Perkawinan+beda+agama%22>. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2023.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mashudi. “Problematika Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia,” pada laman <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/problematika-perkawinan-beda-agama-dalam-perspektif-hukum-positif-di-indonesia-oleh-dr-mashudi-s-h-m-h-i-9-5>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2023.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- MPR RI. “Alhamdulillah, Akhirnya MA Keluarkan Surat Edaran yang Melarang Pencatatan Perkawinan Beda Agama, HNW: Harus Ditaati dan Dilaksanakan Oleh Seluruh Pengadilan” (Juli 2023), dalam laman <https://www.mpr.go.id/berita/Alhamdulillah,-Akhirnya-MA-Keluarkan-Surat-Edaran-yang-Melarang-Pencatatan-Perkawinan-Beda-Agama,-HNW:-Harus-Ditaati-dan-Dilaksanakan-Oleh-Seluruh-Pengadilan>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2023.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- NU Online. “Pakar: SEMA 2/2023 Perjelas Posisi Negara sebagai Lembaga Pengesah Adanya Perkawinan.” Juli 2023. Dalam laman <https://www.nu.or.id/nasional/pakar-sema-2-2023-perjelas-posisi-negara-sebagai-lembaga-pengesah-adanya-perkawinan-MWTqO>. Diakses pada 08 Mei 2024.
- Prasetya, Vestwansan Dipa. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VII No. I, 2020.
- Puniman, Ach.. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 1, Mei 2018.
- Rachman, M. Anwar, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata,, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Kencana, 2022.

- Redaksi Muhammadiyah. “Bolehkah Menikah Beda Agama?,” pada laman <https://muhammadiyah.or.id/bolehkah-menikah-beda-agama/>. Diakses pada tanggal 09 Oktober 2023.
- Rusman, Yusuf Hidayat, dan Anis Rifai. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Kompleksitas dan Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.” *Indonesia Journal of Innovation Studies*, Vol. 24, Oktober 2023.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sastra, Abd. Rozaq A.. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011.
- Sibuea, Hotman P.. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sirajuddin dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. *Legislative Drafting*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Syamsiyah, Marlina. “Izin Perkawinan Agama Atas Penetapan Hakim Perspektif Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia.” Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Syarkowi, Asmu’i. “Akhir Sebuah Ketidaksatuan Pendapat (Hukum).” Agustus 2023. Dalam laman <https://pa-semarang.go.id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/823-akhir-sebuah-ketidaksatuan-pendapat-hukum>. Diakses pada 08 Mei 2024.
- Taufik, M.. “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif.” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, Oktober 2021.
- Ulumuddin, Ikhya dan Fauzi Fadlan, *Al-Qur’an dan Terjemah: Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida’*, cet. ke-5. Jakarta: PT. Suara Agung, 2018.
- Walidaih, Mustaan. “Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Perspektif Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia.” Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Weruin, Urbanus Ura, Dwi Andayani B, St. Atalim, “Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, Maret 2016.
- Yunus, Fakhurrazi M., dan Zahratul Aini. “Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam).” *Media Syari’ah*, Vol. 20 No. 2, 2018.